



Judul : Komisi VIII sedih panti jompo kebakaran, evaluasi standar keamanan panti
Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi VIII Sedih Panti Jompo Kebakaran Evaluasi Standar Keamanan Panti

ANGGOTA Komisi VIII DPR Aprozi Alam menilai kebakaran di Panti Jompo Werdha Damai, Manado, Sulawesi Utara, tidak boleh berlalu tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Kepolisian wajib melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan untuk mengungkap penyebab peristiwa tersebut.

Menurut Aprozi, penyelidikan harus memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran standar keselamatan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Penegakan hukum yang terbuka dinilai penting demi menghadirkan keadilan bagi para korban dan keluarga, sekaligus menjadi pembelajaran agar tragedi serupa tidak terulang.

"Selain penegakan hukum, kejadian ini harus menjadi pelajaran serius agar ke depan tidak ada lagi korban jiwa," tegas Aprozi dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).

Ia juga mendorong Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi, perizinan, dan standar keamanan seluruh panti jompo. Evaluasi tersebut harus mencakup keselamatan jiwa lansia, sistem proteksi kebakaran, kesiapan sumber daya manusia, serta mekanisme evakuasi darurat.

Aprozi menilai, tragedi di Manado menjadi peringatan bahwa niat baik dalam pelayanan sosial tidak cukup tanpa sistem yang kuat dan standar keamanan yang tegas. Lansia merupakan kelompok rentan yang sepenuhnya bergantung pada negara dan pengelola panti

untuk menjamin keselamatan hidup mereka.

Negara, lanjutnya, tidak boleh bersikap reaktif setelah korban berjatuhan. Pencegahan harus menjadi prioritas melalui regulasi yang jelas, pengawasan konsisten, dan penegakan hukum yang tegas. Negara wajib hadir secara nyata agar setiap panti jompo benar-benar menjadi tempat yang aman dan layak bagi lansia.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyebut, peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Para lansia seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara dan seluruh penyelenggara layanan sosial.

Maman menilai, insiden ini menjadi peringatan keras bahwa sistem keselamatan di fasilitas pelayanan lansia masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, Komisi VIII DPR akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panti jompo dan panti sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

"Standar keselamatan kebakaran, kelayakan bangunan, jalur evakuasi, serta kesiapsiagaan petugas harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas administrasi," tegas politikus PKB tersebut.

Ia juga mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran. Investigasi harus dilakukan secara transparan guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian, pelanggaran standar keselamatan, atau lemahnya pengawasan. ■ PYB